



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH**

TAHUN 2025

RENJA PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (**RENJA Perubahan**) Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Renja ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Tahun 2025-2026. Yang Mana renstra ini dituangkan dalam Aplikasi “Sistem Informasi Perencanaan Daerah” (SiCanda) Bappeda Kabupaten Mempawah, sebagai Rancangan Awal Renja di Organisasi Perangkat Daerah dan Mulai Berjalan Pada Tahun 2021. Rencana Kerja (**RENJA**) ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan Organisasi Perangkat Daerah dapat mencetak Matrik Renja Tahun 2025 sebagai Lampiran Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (**RENJA Perubahan**) ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku didasarkan pada data dan informasi yang ada yaitu berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Namun kami juga

menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan (**RENJA Perubahan**) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami atas terealisasinya usulan program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Renja ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (**RENJA Perubahan**) ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Mempawah, Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mempawah




Drs. ROKHMAT EFFENDY, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660515 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	1
2. LANDASAN HUKUM.....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMB. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AANAK, PEMB. MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023	6
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENJA	6
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	20
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	23
II.4 REVIEW TERHADAP (Rancangan Awal) RKPD	25
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	26
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	27
III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	27
III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKP 2023	28
III.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS.....	28
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
BAB IV : PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

TABEL 1	:	Pengukuran kinerja utama terhadap Rencana Strategis (Renstra)	17
TABEL II	:	Rekap hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra s.d tahun 2023	36
TABEL III	:	Rencana Kerja Angaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Dan Perkiraan 2026	44
TABEL IV	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Preangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ...	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahab atau RENJA Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perubahan rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses Penyusunan Renja Perubahan berpedoman dari Rencana Strategis serta Rencana Kerja Perangkat Daerah - Perubahan (RKPD-Perubahan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dan memperhatikan aspirasi atau usulan kegiatan proposal dari masyarakat. Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen lainnya dilihat dari tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk SKPD adalah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026 untuk perencanaan dengan jangka waktu dua tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah 2020-2024.

Untuk melaksanakan rencana tahunan diharuskan menyusun Rencana Kinerja (**RENJA**) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah setiap tahunnnnya pada setiap awal tahun anggaran, sedangkan untuk tingkat Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah – Perubahan (RKPD-Perubahan) adalah Dokumen Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan Rencana Kerja semua SKPD (RENJA SKPD) termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah artinya sebelum RKPD disusun masing-masing SKPD harus menyusun Renjanya terlebih dahulu. Pelaksanaan dari Rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) yang menggambarkan hasil capaian kegiatan dari Rencana Kinerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari Penjelasan diatas artinya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan di tahun 2025 merupakan penetapan kegiatan/proyek, terutama untuk Belanja Langsung secara tahunan melalui indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang terpilih yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026. ***Renja tersebut selanjutnya dihimpun dalam RKPD Perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sampai pada penyusunan RKAP dan DPPA.***

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator 1 Masukan (input) 2. Keluaran (output) 3. Hasil (outcome), gunanya untuk mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 2025-2026.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah adalah ;

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan provinsi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 050 PMK Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Peresiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2025 yang sedang berjalan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Mempawah :

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 kedalam rencana pembangunan tahunan yang di sinkronkan dengan rencana pencapaian sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2026
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan perubahan tahun 2025

3. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2020 – 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 , Yaitu :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN LALU

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah review terhadap rancangan awal renja dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL, PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBAERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan rencana capaian renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah 2025-2026 serta capaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa review terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

II. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA SKPD

Berdasarkan tugas Pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah menyelenggarakan empat urusan yaitu urusan Sosial, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan Pemerintahan Desa. Sebelum mengevaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 kita harus mengetahui Visi dan Misi di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ada pun Visi dan Misi serta Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tersebut di rumuskan dengan isu-isu strategis baik dari dalam maupun dari luar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Adapun Visi, Misi dan Indikator sasaran dimaksud sebagai berikut :

1. VISI

Ada beberapa definisi tentang visi yang dikemukakan para pakar, dan pada dasarnya semua definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama, yakni pandangan mengenai kondisi masa depan.

Berdasarkan pengertian diatas maka rumusan visi dalam renstra dinas ini adalah gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan keinginan dinas dan merupakan cita dan citra yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

1. Pernyataan Visi

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS”

2. Penjelasan Makna Pernyataan Visi

- a. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas adalah penyadaran untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada masyarakat yang memungkinkan, memanfaatkan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

2. MISI

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu Visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusional pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi

sesuai dengan strategi yang telah dipilih memperhatikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (1 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan maka setiap periode (bulan/triwulan/semester/tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja Kabupaten, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksana. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

❖ **Misi Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.**

Tujuan:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial

❖ **Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Tujuan:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan.

Sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender

❖ **Misi Ketiga: Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.**

Tujuan:

1. Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran:

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

❖ **Misi Keempat: Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa**

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa.

Sasaran:

1. Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien dan efektif

❖ **Misi Kelima: Meningkatkan Pelayanan Prima**

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 melaksanakan 16 program utama, 31 kegiatan dan 105 sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- g. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. **Program Pemberdayaan Sosial**
 - a. **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

- a. **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluhan Asal**
 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluhan Asal
4. **Program Rehabilitasi Sosial**
 - a. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 6. Pemberian Layanan Rujukan
 - b. **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
 - a. **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 2. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - b. **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
7. **Program Penangan Bencana**
 - a. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 - b. **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
8. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
 - a. **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
9. **Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
 - a. **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. **Program Perlindungan Perempuan**
 - a. **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
11. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
 - a. **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
12. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
 - a. **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. **Program Perlindungan Khusus Anak**
 - a. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

1. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA
- b. **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
14. **Program Penataan Desa**
 - a. **Penyelenggaraan Penataan Desa**
 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
15. **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**
 - a. **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**
 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
16. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**
 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 9. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 10. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 11. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

17. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPK, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPK, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada rencana Kerja tahun 2025 terdapat 4 sasaran strategis yang dibahas yaitu, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sebagaimana berikut :

TABEL I
Pengukuran kinerja utama terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja Utama	Target Capaian Kinerja Renstra 2024	Target Capaian Kinerja Renstra 2023			Target Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian kinerja Tahun 2025	
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Visi : Terwujudnya Kabupaten Mempawah Maju dan Berdaya Saing										
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial										
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan	1 Persentase Tingkat Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
2.	Menurunkan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS dan PPKS	Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial	75				75	80	
			Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan kesejahteraan sosial					70	75	
		Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan							
		Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa								
3.	Meningkatkan Ketahanan Kebencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana					100	100	100
4.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka IPM Perempuan							
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Angka IPM Perempuan							

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Mempawah Tahun 2025

5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Pemerintahan Desa dalam penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa	80						
				Persentase Desa Yang Meningkatkan Statusnya							
		Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa		Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju							
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak											
2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%
			2	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang dapat diselesaikan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			3	Jumlah organisasi wanita yang dibina	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			4	Persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan											
3.1	Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang telah diberdayakan	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			2	Jumlah kelompok usaha yang dibina	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			3	Jumlah stimulan yang telah disalurkan dalam pembangunan desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur, dan Lembaga Pemerintahan Desa											
4.1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan desa	Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien	1	Kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			2	Kelancaran desa yang dapat mengelola keuangan dengan tertib	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			3	Tingkat kesejahteraan aparatur desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
			4	Jumlah desa yang telah memiliki tata batas desa	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Prima											
5.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Rasio Pemenuhan Ruang Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Persentase lingkungan Perkantoran dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6	Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7	Persentase tingkat kehadiran aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			9	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pemda/SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			10	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda/SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan adalah sebagai berikut :

- I. Program/Kegiatan tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah :
 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa / Sub Kegiatan Fasilitasi Manajmen Pemerintahan Desa
 2. Program Perlindungan Perempuan / Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
 3. Program Perlindungan Khusus Anak / Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
- II. Program/Kegiatan tahun 2023 yang mencapai target adalah :
 1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 4. Program Penanganan Bencana
 5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 7. Program Perlindungan Perempuan
 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 9. Program Pemenuhan Anak (PHA)
 10. Program Perlindungan Khusus Anak
 11. Program Penataan Desa

12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

III. Program/Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target adalah :

Untuk tahun 2022 tidak terdapat program yang melebihi target yang ditentukan.

*Data Tabel Terlampir realisasi capaian Program / kegiatan Pelaksanaan

Renja Tahun 2023.

II. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil penyusunan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam rencana kinerja disajikan strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Ada 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah . yaitu :

1. Persentase pemberdayaan dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin.
2. Persentase pemberdayaan komunitas adat terpencil yang telah diberdayakan
3. Persentase pemberdayaan organisasi sosial yang telah mendapat pembinaan dan diberdayakan
4. Persentase bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial yang telah disalurkan
5. Persentase pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ditangani
6. Persentase peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan
7. Presentase peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
9. Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang dapat diselesaikan
10. Jumlah organisasi wanita yang dibina
11. Persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif
12. Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang telah diberdayakan
13. Jumlah kelompok usaha yang dibina
14. Jumlah stimulan yang telah disalurkan dalam pembangunan desa
15. Kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa
16. Kelancaran desa yang dapat mengelola keuangan dengan tertib
17. Tingkat kesejahteraan aparatur desa
18. Jumlah desa yang telah memiliki tata batas desa

A. Bidang Sosial

Kinerja Bidang Sosial Tahun 2023 meliputi :

1. Melakukan Pendampingan pemberdayaan melalui Fasilitasi Manajemen Keluarga Miskin melalui bantuan 20 Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE);
2. Memberikan Bahan Baku bangunan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 200 Kepala Keluarga dan Memfasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
3. Memberikan Pelatihan dan Keterampilan Pada Keluarga Miskin;
4. Memberikan Pelatihan dan Keterampilan pada Penyandang Disabilitas, Korban penyalahgunaan Obat dan Narkotika, Anak Terlantar, Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 Meliputi :

1. Memfasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan Hari Kartini;

2. Melayani dan memfasilitasi pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan;
3. Melayani pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak dan memfasilitasi pendampingan terhadap pelaku dan korban kekerasan pada anak;
4. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menangani masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
5. Memberikan bantuan pendampingan kepada Korban KDRT, Pencabulan, Penganiayaan Perempuan dan Anak.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja Bidang pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan pada Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar Lembaga, organisasi, dan kader masyarakat mampu dan mau membangun mandiri baik di lingkungan keluarga bagi kader maupun lingkungan masyarakat bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada perangkat desa untuk menyusun profil desa, dan usaha ekonomi desa (UED);
2. Bekerjasama dengan perangkat desa mempromosikan hasil usaha desa dan menggali sumber daya alam yang ada di desa melalui Pameran dan loka karya Teknologi Tepat guna serta perlombaan desa dan kelurahan;
3. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan BBGRM dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

D. Bidang Pemerintahan Desa

Kinerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 meliputi :

1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada perangkat desa untuk menyusun penyusunan alokasi dana desa ;
2. Memfasilitasi penyusunan APBDes dan Evaluasi Penggunaan APBDes;

3. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan E-Voting di 30 Desa Se-Kabupaten Mempawah;
4. Melaksanakan pelantikan hasil dari pemilihan Kepala Desa dan Anggota BPD di 6 Desa sebanyak 65 Orang;

II. 3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Anggaran yang di sediakan melalui APBD Kabupaten Mempawah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang memadai;
2. Jumlah pegawai dari segi Kuantitas masih perlu di tambah;
3. Masih rendahnya SDM perangkat desa;
4. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai;
5. Kurang mengertinya masyarakat dalam hal kekerasan baik pada perempuan, anak dan rumah tangga;
6. Belum adanya tenaga tetap yang menangani rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Mempawah. Hal ini berkaitan dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah SKPD sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang berkaitan.

Tantangan yang di hadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, adalah :

I. Urusan Sosial

1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks hanya ditangani oleh 1 (satu) bidang
2. Kurangnya jumlah pegawai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial
3. Minimnya dana pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Tidak adanya sarana untuk pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahteraan

Sosial lanjut Usia, hal ini karena kurang pedulinya dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap permasalahan Kesejahteraan sosial

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sumber daya aparatur pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya

III. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih Kurangnya pendelegasian Tupoksi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

IV. Urusan Pemerintahan Desa

1. Sumberdaya aparatur yang terbatas dari segi kuantitas di bidang pemerintahan desa Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes
2. Adanya perbedaan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa di tingkat kementerian memberikan dampak perbedaan pemahaman desa dalam menginterpretasikan kebijakan tersebut

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran dari permasalahan diatas, guna tercapinya Visi dan Misi, yaitu :

I. Urusan Sosial

1. Adanya penambahan pegawai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial, dan menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
2. Melakukan pendataan dan pemetaan sosial melalui Program Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
3. Menambah Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial seperti tempat dan kendaraan operasional tanggap darurat bencana, serta mobil Unit Pelayanan Sosial Keliling UPRSK, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Rehabilitasi Penyalagunaan Obat Narkotika.

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mengantisipasi kurangnya jumlah aparatur, Bidang PPPA terus menjalin kerjasama yang baik dengan KPAID Kabupaten Mempawah, Polres Mempawah dan Instansi dan OPD lain.

III. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan kiranya bisa di tambah struktural eselon IV.B serta pelaksana dari disiplin ilmu pemberdayaan masyarakat untuk menangani tupoksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Serta adanya dukungan dana untuk melaksanakan konsultasi di kementerian dan Provinsi. Serta adanya kesatuan arah baik itu di pusat maupun di Pemerintah Tingkat atas dalam penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

IV. Urusan Pemerintahan Desa

1. Melibatkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan langsung terhadap 60 desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Pembagian uraian tugas yang jelas kepada seluruh pelaksana / fungsional umum bidang pemerintahan desa guna optimalisasi pelaksanaan realisasi kinerja.

II.4. REVIEW TERHADAP (Rancangan Awal) RKPD

Usulan rencana program dan kegiatan awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra DSPPPAPMPD untuk tahun 2023, terdiri dari 14 Program dan 22 kegiatan serta 62 sub kegiatan dengan total anggaran untuk belanja langsung berjumlah **Rp.9.565.778.271,- (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satun Rupiah).**

Penyusunan rancangan Renja Dinas SPPPAPMPD Kabupaten Mempawah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah dan tingkat kerja yang di capai DSPPPAPMPD, dengan arahan Bupati Mempawah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Riview terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, di lakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu di lakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan DSPPPAPMPD. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

TABEL I
Pengukuran kinerja utama terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja Utama	Target Capaian Kinerja Renstra 2024	Target Capaian Kinerja Renstra 2023			Target Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi capaian kinerja Tahun 2025		
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas											
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial											
1.1	Meningkatkan Perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial	1	Persentase Penurunann Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	20%	19.5%	97.5%	100%	100%	100%
			2	Persentase Anak Terlantar Yang Dapat Ditangani	100%	20%	19.1%	95.5%	100%	100%	100%
			3	Persentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	100%	10%	10.0%	100.0%	100%	100%	100%
			4	Persentase Pelatihan Terhadap PMKS	100%	10%	10.0%	100.0%	100%	100%	100%
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak											
2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender	1	Persentase Pemenuhan Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak	100%	2.5%	2.5%	100%	100%	100%	100%
			2	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani	100%	33.3%	33.3%	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan											
3.1	Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan	Meningktnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Yang Telah	1	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang telah dibins	100%	60 Desa	60 Desa	100%	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur, dan Lembaga Pemerintahan Desa											
4.1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya Jumlah Pembinaan Masyarakat Pedesaan	1	Persentase Desa Mandiri	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Prima											
5.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat	Terciptanya Kelembagaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	1	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	45%	45%	100%	100%	100%	100%

Tabel II
Rekap hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra s.d tahun 2024

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	70%	0%							
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80%	0%							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%								
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 Orang	117 Orang	-	-	-	126 Orang	126 Orang	100%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	-	-	-	-	9 Keluarga	9 Keluarga	100%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Keluarga	-	-	-	-	-	-	0%	
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	28 Lembaga	-	-	-	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	-	-	-	-	30 Sertifikat	30 Sertifikat	100%	
2	Prgram Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Rata-rata PMKS yang Di tangani	100%								
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%								
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-	
	Progam Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial	60%								
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	20%								
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	90 Orang	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	0 Orang							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0 Orang							
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang							
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	0 Orang							
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang							
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	20%								
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang							
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	35 Orang							
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen							
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil Yang Mendapat Bantuan Sosial	60%								
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	40%								
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	666 Orang							
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Buah	0 Orang							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Mempawah	30%								
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000 Orang	0 Orang							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga							
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam Yang Dibantu	60%								
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS	60%								
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	990 Orang							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	0 Orang							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Mempawah	60%								

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung							
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	0 Orang							
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Capaian Pengelolaan Area Pemakaman	80%								
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah	60%								
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0 Makam							
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	0 Laporan							
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas perempuan	75%								
	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan pendampingan Pelaksanaan PUG									
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG PPRG keseluruhan OPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen							
9	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dapat diselesaikan	70%								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah							
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	11 Orang							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	0 Layanan							
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok Yang Terbina	65%								
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga	50%								
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen							
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Laporan	18 Laporan							
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan Kualitas Anak	74%								
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada	75%								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	5 Organisasi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Atas Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	75%								
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen							
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	82%								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi PBAP	50%								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen							
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi PBAP	25%								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35 Kasus							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan							
12	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Batas	70%								
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	30%								
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	2 Desa							
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1 Unit							
13	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa Mandiri	50%								
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	50%								
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	0 Dokumen							
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Peraturan Desa	75%								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30%								
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	3 Dokumen							
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	120 Dokumen	120 Dokumen							
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	60 Laporan	0 Laporan							
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	42 Dokumen	0 Dokumen							
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	19 Laporan	0 Laporan							
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen							
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang	0 Orang							
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	10 Desa							
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	60 Dokumen	60 Dokumen							

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lemaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Dibina	80%								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sertaPemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah pelaksanaan bimtek kader Pemberdayaan Masyarakat	60%								
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2060 Lembaga	0 Lembaga							
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	290 Unit	0 Unit							
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60 Dokumen	60 Dokumen							
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan							
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	60 Laporan	0 Laporan							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	60 Dokumen	0 Dokumen							
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60 Dokumen	0 Dokumen							
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	75%								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80%								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen								

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capain	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Laporan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporsn								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	80%								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	80%								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	80%								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100%	34 Laporan	34 Laporan	100%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Penunjang Urusan Kantor	100%								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	-	-	-	-	-	12 Unit	100%	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	-	-	-	-	-	55 Unit	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	14 Unit	-	-	-	-	-	14 Unit	100%	

No	Uraian/ Bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target capaian kinerja renstra tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan S/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (Tahun lalu N-2)			Target Program/ Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	4 Unit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	6 Unit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80%								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80%								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Kode Rekning	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11,543,184,142.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6,121,339,083.00
37043	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	6,898,942,942.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			90 %	4,618,268,927.00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	47,497,600.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80 %	34,029,700.00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,997,600.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,960,000.00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,569,700.00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000.00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3,500,300.00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	7,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,000,000.00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	16,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14,999,700.00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	4,547,105,342.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90 %	4,217,998,527.00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	4,495,457,642.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	4,168,613,827.00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	31,650,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	29,387,000.00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14,998,200.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,998,200.00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4,999,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4,999,500.00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	12,100,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80 %	11,700,000.00
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,100,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11,700,000.00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	69,612,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80 %	25,000,000.00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	29,612,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	0.00
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	40,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25,000,000.00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	178,388,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80 %	68,848,700.00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,746,100.00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,000,000.00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,500,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,856,000.00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,996,600.00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35,000,000.00	Penyediaan Bahan/Material	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0.00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	60,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	37,500,000.00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19,888,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,750,000.00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1,534,170,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80 %	0.00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	12 Unit	1,241,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	12 Unit	0.00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	76,120,000.00	Pengadaan Meubel	DSPPPAPMPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	0.00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnta	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	107,500,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnta	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0.00
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	48,250,000.00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0.00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0.00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11,300,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0.00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	155,550,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80 %	100,000,000.00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	101,550,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0.00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	54,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100,000,000.00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	354,520,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80 %	160,692,000.00

Kode Rekning	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DSPPPAPMPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DSPPPAPMPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17,411,200.00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	45,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DSPPPAPMPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	33,713,800.00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0.00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	243,500,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,897,000.00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	8,500,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	3,570,000.00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	18,500,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6,100,000.00
37408	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100 %	1,551,408,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			75 %	331,857,964.00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	10,000,000.00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			75 %	0.00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	0.00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1,541,408,000.00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			70 %	331,857,964.00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 Orang	319,525,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	114,736,776.00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	127,900,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	106,796,188.00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Keluarga	484,427,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	9,725,200.00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	513,906,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	100,599,800.00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DSPPPAPMPD	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	95,650,000.00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DSPPPAPMPD	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	0.00
37773	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			100 %	15,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			70 %	0.00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100 %	15,000,000.00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			70 %	0.00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DSPPPAPMPD	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	15,000,000.00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DSPPPAPMPD	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0.00
38139	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100 %	1,285,183,200.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			80 %	821,141,360.00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100 %	761,410,000.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			80 %	329,931,888.00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200,000,000.00	Penyediaan Permakanan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	45,486,000.00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	75,000,000.00	Penyediaan Sandang	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	28,789,000.00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	105,000,000.00	Penyediaan Alat Bantu	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	44,095,000.00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	250,000,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	174,069,336.00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	65,705,000.00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	6,545,000.00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	65,705,000.00	Pemberian Layanan Rujukan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30,947,552.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100 %	523,773,200.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			80 %	491,209,472.00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72,773,200.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	21,309,800.00
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	425,000,000.00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DSPPPAPMPD	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	9564 Orang	369,899,672.00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	26,000,000.00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100,000,000.00

Kode Rekning	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
38504	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100 %	747,150,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			80 %	88,147,436.00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			100 %	275,000,000.00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			44 %	45,045,700.00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DSPPPAPMPD	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	200,000,000.00	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DSPPPAPMPD	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	45,045,700.00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DSPPPAPMPD	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	75,000,000.00	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DSPPPAPMPD	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	472,150,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	43,101,736.00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000 Orang	18,900,000.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	161258 Orang	31,563,168.00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3 Keluarga	453,250,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	22274 Keluarga	11,538,568.00
38869	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 %	814,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 %	207,001,900.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100 %	600,000,000.00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1200 Orang	207,001,900.00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	400,000,000.00	Penyediaan Makanan	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	107,001,900.00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	200,000,000.00	Penyediaan Sandang	DSPPPAPMPD	JJumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	100,000,000.00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100 %	214,000,000.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100 %	0.00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	DSPPPAPMPD	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	120,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	DSPPPAPMPD	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	0.00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	94,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	DSPPPAPMPD	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	0.00
39234	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 %	231,500,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 %	54,921,496.00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100 %	231,500,000.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100 %	54,921,496.00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000.00	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	57,500,000.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	53,648,116.00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	24,000,000.00	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,273,380.00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1,979,520,200.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				984,467,238.00
37470	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			100 %	90,000,000.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			100 %	40,000,000.00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	30,000,000.00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	0.00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DSPPPAPMPD	Jumlah Sosialisasi PUG PPRG ke Seluruh OPD	2 Kegiatan	30,000,000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DSPPPAPMPD	Jumlah Sosialisasi PUG PPRG ke Seluruh OPD	70 Orang	0.00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	60,000,000.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	40,000,000.00
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	60,000,000.00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	40,000,000.00
37835	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100 %	137,720,200.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100 %	59,845,300.00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100 %	79,000,000.00	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			4 Kecamatan	40,000,000.00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	60,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0.00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat	19,000,000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat	40,000,000.00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	58,720,200.00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Kasus	19,845,300.00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	8,720,200.00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	0.00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	50,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	19,845,300.00
38201	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100 %	947,800,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100 %	243,438,000.00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	947,800,000.00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4 Kecamatan	243,438,000.00
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	37,000,000.00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	0.00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Laporan	910,800,000.00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	243,438,000.00
38931	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100 %	554,000,000.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Madya	445,860,000.00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	479,000,000.00	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	350,000,000.00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Orang	50,000,000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	40,000,000.00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	429,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	310,000,000.00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Indikator:	100 %	75,000,000.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Indikator:	100 %	95,860,000.00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75,000,000.00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95,860,000.00
39296	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100 %	250,000,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100 %	195,323,938.00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100 %	20,000,000.00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			9 Kecamatan	55,000,000.00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	20,000,000.00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DSPPPAPMPD	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	55,000,000.00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	230,000,000.00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40 Orang	140,323,938.00
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	150,000,000.00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	104,943,936.00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	80,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DSPPPAPMPD	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	40 Layanan	35,380,002.00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8,026,196,572.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,046,248,604.00
41307	PROGRAM PENATAAN DESA			100 %	879,918,072.00	PROGRAM PENATAAN DESA			80 %	9,000,000.00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			100 %	879,918,072.00	Penyelenggaraan Penataan Desa			60 Desa	9,000,000.00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	19,483,000.00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	0.00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	860,435,072.00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	9,000,000.00
41308	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100 %	700,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			40 %	0.00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa			100 %	700,000,000.00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa			6 Desa	0.00
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	100,000,000.00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	100,000,000.00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	0.00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000.00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	0.00
41309	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			100 %	2,246,278,500.00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			18 Desa	1,144,172,894.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	2,246,278,500.00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			80 %	1,144,172,894.00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	14,580,000.00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	3,000,000.00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	60,000,000.00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	15,000,000.00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	120 Dokumen	159,849,500.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	60 Dokumen	30,830,765.00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	175,000,000.00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	994,740,480.00
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	60 Laporan	150,000,000.00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DSPPPAPMPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 Laporan	0.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2022 **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dengan menerapkan 5 Program Nasional , yaitu :

- (1) Pembangunan Nasional dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil dan Industrialisasi serta memperluas kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran dari Program Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar di bidang Sosial :

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak;
3. Urusan Sosial Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan pangan Non Tunai;

4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menitik beratkan pada Pelayanan Ramah Anak, Edukasi dan Informasi Hak Anak atas ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi GGL dan Edukasi dan Informasi Bahaya Rokok dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
6. Urusan Pemerintahan Desa

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKP 2025

Arah kebijakan dan strategi Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dari RKP 2025 :

1. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial
3. Penyediaan Akses Hunian YLayak dan Terjangkau
4. Percepatan Pembangunan Desa
5. Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi

III.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS

Sebagai penjabaran dari Misi dan Visi tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif, harus searah dengan Visi dan Misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, untuk menanggapi isu-isu strategis maka Sasaran selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

❖ Misi Pertama : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran:

1. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial

❖ **Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Tujuan:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta meningkatkan peran perempuan.

Sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender

❖ **Misi Ketiga : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.**

Tujuan:

1. Memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran:

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

❖ **Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Manajemen, Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa**

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa.

Sasaran:

1. Terciptanya kelembagaan pemerintahan desa yang efisien dan efektif

❖ **Misi Kelima : Meningkatkan Pelayanan Prima**

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Aparatur dan Masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja aparat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel : III

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Rp 1,503,070,156			Rp 4,644,241,200
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terlaksanya Pemberdayaan Sosial	Rp 331,857,964			Rp 1,551,408,000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanya ketertiban dalam pengumpulan sumbangan	Rp -			Rp 10,000,000
1	06	02	2.02	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Rp -		DSPPPAPMPD	Rp 10,000,000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSK)	Rp 331,857,964			Rp 1,541,408,000
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah SDM Petugas, Pendamping Sosial Dan Keluarga Penerima Manfaat Pemberdayaan Fakir Miskin Dan PMKS Lainnya yang mendapatkan Bimbingan Teknis	Rp 114,736,776	126 orang	DSPPPAPMPD	Rp 319,525,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Profesional	Rp 106,796,188	9 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 127,900,000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Keluarga Yang Ditingkatkan Potensinya	Rp 9,725,200	3 Program	DSPPPAPMPD	Rp 484,427,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Yang meningkat Prestasinya (KUBE, Karang Taruna, Orsos, PSM, Pendamping PKH, TKSK)	Rp 100,599,800	30 orang	DSPPPAPMPD	Rp 513,906,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus/Permasalahan Keluarga Yang ditangani	Rp -		DSPPPAPMPD	Rp 95,650,000
1	06	02			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan'	Rp -			Rp 15,000,000
1	06	02	2.02		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp -			Rp 15,000,000
1	06	02	2.02	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPPAPMPD	Rp 15,000,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rp 821,141,360			Rp 1,285,183,200
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terlaksanya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Luar panti	Rp 329,931,888			Rp 761,410,000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan untuk meningkatkan kebutuhan dasar lansia	Rp 45,486,000	50 orang	DSPPPAPMPD	Rp 200,000,000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 28,789,000	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 75,000,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 44,095,000	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 105,000,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah eks Penyandang Trauma yang mendapat bimbingan fisik, mental, spititual dan	Rp 174,069,336	70 orang	DSPPPAPMPD	Rp 250,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
						sosial				
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Terlaksanya analisa data dan permasalahan anak terlantar	Rp 6,545,000	2 Program	DSPPPAPMPD	Rp 65,705,000
1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial yang terlaksana bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), korban eksploitasi Anak Dan perempuan	Rp 30,947,552	40 pendampingan	DSPPPAPMPD	Rp 65,705,000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV AID dan Napza di Luar Panti Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya	Rp 491,209,472			Rp 523,773,200
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar aids dan Napza yang mendapatkan Bimtek	Rp 21,309,800	20 orang	DSPPPAPMPD	Rp 72,773,200
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Pendamping yang melaksanakan Bimbingan Penguatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp 369,899,672	41 Pendamping, 7.799 KK	DSPPPAPMPD	Rp 425,000,000
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Razia Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya	Rp 100,000,000	2 kali	DSPPPAPMPD	Rp 26,000,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksanya Pendataan keluarga miskin dan penerima Bantuan Program perlindungan Sosial	Rp 88,147,436			Rp 747,150,000
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksanya Pemeliharaan, Penjangkauan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar	Rp 45,045,700			Rp 275,000,000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar dan LKSA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Rp 45,045,700	40 anak, 2 LKSA	DSPPPAPMPD	Rp 200,000,000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPPAPMPD	Rp 75,000,000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan penerima Program perlindungan Sosial Tepat sasaran.	Rp 43,101,736			Rp 472,150,000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin dan Penerima Bantuan Perlindungan Sosial (BPNT, PBI)	Rp 31,563,168	34.571 KK	DSPPPAPMPD	Rp 18,900,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp 11,538,568	3 data	DSPPPAPMPD	Rp 453,250,000
		05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPPAPMPD	
		05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPPAPMPD	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksanya Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial	Rp 207,001,900			Rp 814,000,000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Terlaksanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Rp 207,001,900			Rp 600,000,000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 107,001,900	1000 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 400,000,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000	1000 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 200,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
1	06	06			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	Rp -			Rp 214,000,000
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPAPMPD	Rp 120,000,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -		DSPPAPMPD	Rp 94,000,000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam pahlawan Kabupaten	Rp 54,921,496			Rp 231,500,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Makam pahlawan Nasional	Rp 54,921,496			Rp 231,500,000
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota	Rp -		DSPPAPMPD	Rp 150,000,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp 53,648,116	1 Makam	DSPPAPMPD	Rp 57,500,000
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 1,273,380	2 Laporan	DSPPAPMPD	Rp 24,000,000
JUMLAH							Rp 1,503,070,156			Rp 4,644,241,200

Tabel : III

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp 949,467,238			Rp 1,978,720,200
02	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terlaksanya Pemberdayaan Sosial	Rp 40,000,000			Rp 90,000,000
02	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dab Pendampingan Pelaksanaan PUG	Rp -			Rp 30,000,000
02	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG ke seluruh OPD	Rp -		DSPPPAPMPD	Rp 30,000,000
02	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Rp 40,000,000	-		Rp 60,000,000
02	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Rp 40,000,000	2 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 60,000,000
02	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp 59,845,300			Rp 137,720,200
02	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan	Rp 40,000,000			Rp 79,000,000
02	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	-	DSPPPAPMPD	Rp 60,000,000
02	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40,000,000	2 Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	Rp 19,000,000
02	08	03	2.01		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Rp 19,845,300			Rp 58,720,200
02	08	03	2.01	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Rp -	15 orang	DSPPPAPMPD	Rp 8,720,200
02	08	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 19,845,300	1 Layanan	DSPPPAPMPD	Rp 50,000,000
02	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelompok Yang Terbina	Rp 243,438,000			Rp 947,000,000
02	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga	Rp 243,438,000			Rp 947,000,000
02	08	05	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rp -	5 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 37,000,000
02	08	05	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 243,438,000	18 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 910,000,000
02	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Advokasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Anak	Rp 445,860,000			Rp 554,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
						Persentase Advokasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Anak				
02	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan	Rp 350,000,000			Rp 479,000,000
02	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Rp 40,000,000	5 Organisasi	DSPPPAPMPD	Rp 50,000,000
02	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 310,000,000	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 429,000,000
02	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Rp 95,860,000			Rp 75,000,000
02	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 95,860,000	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 75,000,000
02	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	Rp 160,323,938			Rp 250,000,000
02	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 20,000,000			Rp 20,000,000
02	08	07	2.01	02	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp 20,000,000	50 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 20,000,000
02	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Rp 140,323,938			Rp 230,000,000
02	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 104,943,936	40 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 150,000,000
02	08	07	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Rp 35,380,002	40 Layanan	DSPPPAPMPD	Rp 80,000,000
JUMLAH							Rp 949,467,238			Rp 1,978,720,200

Tabel : III

**RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Rp 2,893,075,710			Rp 4,200,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Dibina	Rp 2,893,075,710			Rp 4,200,000,000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat Yang Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Rp 2,893,075,710			Rp 4,200,000,000
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp -	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 200,000,000
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 66,673,000	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 250,000,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 1,430,213,510	5 Lembaga	DSPPPAPMPD	Rp 500,000,000
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1,300,000,000	5 Unit	DSPPPAPMPD	Rp 1,000,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp -	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 300,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp -	1 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 250,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp -	1 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 500,000,000
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp -	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 200,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 96,189,200	1 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 1,000,000,000
JUMLAH							Rp 2,893,075,710			Rp 4,200,000,000

Tabel : III

**RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2025**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR TAHUN 2026
							JUMLAH DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Rp 1,153,172,894			Rp 3,826,196,572
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Batas	Rp 9,000,000			Rp 879,918,072
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 9,000,000			Rp 879,918,072
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp -	2 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 19,483,000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Rp 9,000,000	1 Unit	DSPPPAPMPD	Rp 860,435,072
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Mandiri	Rp -			Rp 700,000,000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	Rp -			Rp 700,000,000
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp -	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 100,000,000
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp -	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 100,000,000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp -	30 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 500,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Peraturan Desa	Rp 1,144,172,894			Rp 2,246,278,500
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1,144,172,894			Rp 2,246,278,500
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp 3,000,000	3 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 14,580,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 15,000,000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 60,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 30,830,765	120 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 159,849,500
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp 994,740,480	3 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 175,000,000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp -	60 Laporan	DSPPPAPMPD	Rp 150,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 37,476,800	60 desa	DSPPPAPMPD	Rp 100,000,000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp -	19 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 150,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Rp 10,000,000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 250,000,000
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp -	3 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 500,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Rp 15,000,000	60 Dokumen	DSPPPAPMPD	Rp 157,849,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp -	120 Orang	DSPPPAPMPD	Rp 50,000,000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Rp 38,124,849	15 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 79,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp -	60 Desa	DSPPPAPMPD	Rp 400,000,000
JUMLAH							Rp 1,153,172,894			Rp 3,826,196,572

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada 2025 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 melaksanakan 15 program utama, 25 kegiatan dan 70 sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS
		2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

		1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	d.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	e.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	f.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	g.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.			Program Pemberdayaan Sosial
	a.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.			Program Rehabilitasi Sosial
	a.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		1.	Penyediaan Permakanan
		2.	Penyediaan Sandang
		3.	Penyediaan Alat Bantu
		4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		5.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		6.	Pemberian Layanan Rujukan
	b.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

		1.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		2.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
		3.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	a.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
		1.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
	b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penangan Bencana		
	a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		1.	Penyediaan Makanan
		2.	Penyediaan Sandang
6.	Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawan		
	a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7.	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
	b.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
8.	Program Perlindungan Perempuan		
	a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	b.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
	a.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
	a.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada

			Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	b.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
11.	Program Perlindungan Khusus Anak		
	a.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
	b.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
12.	Program Penataan Desa		
	a.	Penyelenggaraan Penataan Desa	
		1.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
14.	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
		6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		7.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		8.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
	a.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan

			dan Masyarakat Hukum Adat
		2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel. 4.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MEMPAWAH

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
1.06.2.08.2.13.0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa				11,152,054,925.00			28,243,769,514.00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6,121,339,083.00			14,432,055,942.00
37043	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			90 %	4,618,268,927.00			6,964,530,942.00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80 %	34,029,700.00			47,497,600.00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	4,960,000.00	APBD		8,997,600.00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	2,569,700.00	APBD		3,500,000.00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	4,000,000.00	APBD		7,500,000.00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	3,500,300.00	APBD		3,500,000.00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	4,000,000.00	APBD		7,500,000.00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DSPPPAPMPD	3 Laporan	14,999,700.00	APBD		16,500,000.00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90 %	4,217,998,527.00			4,547,105,342.00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DSPPPAPMPD	35 Orang/Bulan	4,168,613,827.00	APBD		4,495,457,642.00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DSPPPAPMPD	12 Dokumen	29,387,000.00	APBD		31,650,000.00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DSPPPAPMPD	1 Laporan	14,998,200.00	APBD		14,998,200.00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DSPPPAPMPD	1 Laporan	4,999,500.00	APBD		4,999,500.00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80 %	11,700,000.00			12,100,000.00
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DSPPPAPMPD	12 Laporan	11,700,000.00	APBD		12,100,000.00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80 %	25,000,000.00			75,000,000.00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DSPPPAPMPD	50 Paket	0.00	APBD		35,000,000.00
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DSPPPAPMPD	50 Orang	25,000,000.00	APBD		40,000,000.00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80 %	68,848,700.00			195,888,000.00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	1,746,100.00	APBD		5,000,000.00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	13,000,000.00	APBD		20,000,000.00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	2,856,000.00	APBD		10,000,000.00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	11,996,600.00	APBD		31,000,000.00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DSPPPAPMPD	1 Paket	0.00	APBD		35,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DSPPPAPMPD	35 Laporan	37,500,000.00	APBD		75,000,000.00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	1,750,000.00	APBD		19,888,000.00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80 %	0.00			1,572,870,000.00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	12 Unit	0.00	APBD		1,241,000,000.00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DSPPPAPMPD	55 Unit	0.00	APBD		76,120,000.00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	14 Unit	0.00	APBD		107,500,000.00
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	4 Unit	0.00	APBD		48,250,000.00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	6 Unit	0.00	APBD		50,000,000.00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Unit	0.00	APBD		50,000,000.00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80 %	100,000,000.00			155,550,000.00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Laporan	0.00	APBD		101,550,000.00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DSPPPAPMPD	3 Laporan	100,000,000.00	APBD		54,000,000.00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80 %	160,692,000.00			358,520,000.00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DSPPPAPMPD	1 Unit	17,411,200.00	APBD		24,000,000.00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DSPPPAPMPD	6 Unit	33,713,800.00	APBD		45,020,000.00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DSPPPAPMPD	1 Unit	0.00	APBD		15,000,000.00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DSPPPAPMPD	1 Unit	99,897,000.00	APBD		243,500,000.00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DSPPPAPMPD	10 Unit	3,570,000.00	APBD		12,500,000.00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DSPPPAPMPD	6 Unit	6,100,000.00	APBD		18,500,000.00
37408	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			75 %	331,857,964.00			979,525,000.00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			75 %	0.00			10,000,000.00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DSPPPAPMPD	10 Dokumen	0.00	APBD		15,000,000.00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			70 %	331,857,964.00			969,525,000.00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	85 Orang	114,736,776.00	APBD		319,525,000.00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	9 Orang	106,796,188.00	APBD		150,000,000.00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	10 Keluarga	9,725,200.00	APBD		200,000,000.00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Lembaga	100,599,800.00	APBD		250,000,000.00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Sertifikat	0.00	APBD		50,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
37773	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			70 %	0.00			20,000,000.00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			70 %	0.00			20,000,000.00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	10 Orang	0.00	APBD		20,000,000.00
								0.00
38139	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			80 %	821,141,360.00			1,525,000,000.00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			80 %	329,931,888.00			875,000,000.00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	80 Orang	45,486,000.00	APBD		125,000,000.00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 Orang	28,789,000.00	APBD		100,000,000.00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	22 Orang	44,095,000.00	APBD		200,000,000.00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	50 Orang	174,069,336.00	APBD		350,000,000.00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	400 Orang	6,545,000.00	APBD		50,000,000.00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 Orang	30,947,552.00	APBD		50,000,000.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			80 %	491,209,472.00			650,000,000.00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	6 Orang	21,309,800.00	APBD		50,000,000.00
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	9564 Orang	369,899,672.00	APBD		400,000,000.00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	4 Dokumen	100,000,000.00	APBD		200,000,000.00
38504	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			80 %	88,147,436.00			3,020,000,000.00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			44 %	45,045,700.00			120,000,000.00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 Orang	45,045,700.00	APBD		100,000,000.00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	50 Orang	0.00			20,000,000.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	43,101,736.00			2,900,000,000.00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	DSPPPAPMPD	161258 Orang	31,563,168.00	APBD		250,000,000.00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	22274 Keluarga	11,538,568.00	APBD		350,000,000.00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	12000 Keluarga	0.00	APBD		2,000,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	100 Orang	0.00	APBD		300,000,000.00
38869	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 %	207,001,900.00			1,650,000,000.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1200 Orang	207,001,900.00			1,300,000,000.00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1200 Orang	107,001,900.00	APBD		800,000,000.00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1200 Orang	100,000,000.00	APBD		500,000,000.00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100 %	0.00			350,000,000.00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	4 Kampung	0.00	APBD		300,000,000.00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	48 Orang	0.00	APBD		50,000,000.00
39234	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 %	54,921,496.00			273,000,000.00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100 %	54,921,496.00			273,000,000.00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		150,000,000.00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	7 Makam	53,648,116.00	APBD		75,000,000.00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Laporan	1,273,380.00	APBD		48,000,000.00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				984,467,238.00			2,914,000,000.00
37470	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			100 %	40,000,000.00			200,000,000.00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	0.00			100,000,000.00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG PPRG ke Seluruh OPD	DSPPPAPMPD	70 Orang	0.00	APBD		100,000,000.00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	40,000,000.00			100,000,000.00
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DSPPPAPMPD	2 Dokumen	40,000,000.00	APBD		100,000,000.00
37835	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100 %	59,845,300.00			165,000,000.00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			4 Kecamatan	40,000,000.00			85,000,000.00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	4 Dokumen	0.00	APBD		35,000,000.00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	4 Perangkat	40,000,000.00	APBD		50,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Kasus	19,845,300.00			80,000,000.00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DSPPPAPMPD	15 Orang	0.00	APBD		30,000,000.00
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Layanan	19,845,300.00	APBD		50,000,000.00
38201	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100 %	243,438,000.00			1,695,000,000.00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4 Kecamatan	243,438,000.00			1,695,000,000.00
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DSPPPAPMPD	4 Dokumen	0.00	APBD		70,000,000.00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	243,438,000.00	APBD		1,625,000,000.00
38931	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Madya	445,860,000.00			604,000,000.00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	350,000,000.00			479,000,000.00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DSPPPAPMPD	35 Organisasi	40,000,000.00	APBD		50,000,000.00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	310,000,000.00	APBD		429,000,000.00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100 %	95,860,000.00			125,000,000.00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	95,860,000.00	APBD		125,000,000.00
39296	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100 %	195,323,938.00			250,000,000.00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			9 Kecamatan	55,000,000.00			50,000,000.00
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DSPPPAPMPD	50 Orang	55,000,000.00	APBD		50,000,000.00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40 Orang	140,323,938.00			200,000,000.00
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	40 Orang	104,943,936.00	APBD		150,000,000.00
2.08.07.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	DSPPPAPMPD	40 Layanan	35,380,002.00	APBD		50,000,000.00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,046,248,604.00			10,897,713,572.00
41307	PROGRAM PENATAAN DESA			80 %	9,000,000.00			70,000,000.00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			60 Desa	9,000,000.00			70,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DSPPPAPMPD	2 Desa	0.00	APBD		20,000,000.00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	DSPPPAPMPD	1 Unit	9,000,000.00	APBD		50,000,000.00
41308	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			40 %	0.00			200,000,000.00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa			6 Desa	0.00			200,000,000.00
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		100,000,000.00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	DSPPPAPMPD	30 Dokumen	0.00	APBD		
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		100,000,000.00
41309	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			18 Desa	1,144,172,894.00			3,152,713,572.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			80 %	1,144,172,894.00			3,152,713,572.00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	DSPPPAPMPD	3 Dokumen	3,000,000.00	APBD		14,580,000.00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	15,000,000.00	APBD		60,000,000.00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	30,830,765.00	APBD		159,849,500.00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	DSPPPAPMPD	60 Orang	994,740,480.00	APBD		910,435,072.00
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DSPPPAPMPD	2 Laporan	0.00	APBD		150,000,000.00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	37,476,800.00	APBD		150,000,000.00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DSPPPAPMPD	11 Laporan	0.00	APBD		250,000,000.00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	10,000,000.00	APBD		250,000,000.00
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		500,000,000.00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	DSPPPAPMPD	60 Dokumen	15,000,000.00	APBD		157,849,000.00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	DSPPPAPMPD	60 Orang	0.00	APBD		50,000,000.00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	DSPPPAPMPD	15 Desa	38,124,849.00	APBD		100,000,000.00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DSPPPAPMPD	9 Dokumen	0.00	APBD		400,000,000.00
41310	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			11,6 %	2,893,075,710.00			7,475,000,000.00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			240 Lembaga	2,893,075,710.00			7,475,000,000.00
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		100,000,000.00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	66,673,000.00	APBD		250,000,000.00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DSPPPAPMPD	5 Unit	1,430,213,510.00	APBD		1,200,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	1,300,000,000.00	APBD		1,500,000,000.00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DSPPPAPMPD	1 Laporan	0.00	APBD		175,000,000.00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DSPPPAPMPD	1 Laporan	0.00	APBD		200,000,000.00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		1,500,000,000.00
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	0.00	APBD		150,000,000.00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DSPPPAPMPD	1 Dokumen	96,189,200.00	APBD		2,000,000,000.00
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DSPPPAPMPD	20 Keluarga	0.00	APBD		200,000,000.00
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DSPPPAPMPD	20 Keluarga	0.00	APBD		200,000,000.00

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.06.2.08.2.13.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.06.02.2.02
Pengumpulan
Sumbangan dalam

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Masyarakat

1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pemulangan Warga
Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan dari Titik

1.06.03.2.01	
1.06.03.2.01.01	
Fasilitasi	
Pemulangan Warga	

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial
	Penyanggah Masalah
	Kesejahteraan Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-
	Anak Terlantar
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data
	Fakir Miskin Cakupan
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial
	Korban Bencana
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan
	Pemberdayaan
	Masyarakat terhadap
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman
	Makam Pahlawan
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelembagaan
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>

2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenang:

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupa
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan K
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewe
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupa

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
------	---

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
------	---

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot:
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan K

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA

2.13.02.2.01
Penyelenggaraan
Penataan Desa

2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

2.13.03.2.01
Fasilitasi Kerja sama
antar Desa

2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

2.13.04.2.01
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
------	---

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
------	---

2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MA

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang

2.13.05.2.01
2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.02
Fasilitasi Penataan,

2.13.05.2.01.03
Peningkatan

2.13.05.2.01.04	
Fasilitasi Penyediaan	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan I

Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				
	DAU		DAK	Lain	Jumlah
akad dan Pemerintah Desa	21.548.900.914,00	0,00	0,00	21.548.900.914,00	0,00
	11.543.184.142,00	0,00	0,00	11.543.184.142,00	0,00
	6.898.942.942,00	0,00	0,00	6.898.942.942,00	0,00

8.997.600,00	0,00	0,00	8.997.600,00	0,00
3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00

4.495.457.642,00	0,00	0,00	4.495.457.642,00	0,00
31.650.000,00	0,00	0,00	31.650.000,00	0,00
14.998.200,00	0,00	0,00	14.998.200,00	0,00
4.999.500,00	0,00	0,00	4.999.500,00	0,00

12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00
---------------	------	------	---------------	------

29.612.000,00	0,00	0,00	29.612.000,00	0,00
40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00

4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
19.888.000,00	0,00	0,00	19.888.000,00	0,00

1.241.000.000,00	0,00	0,00	1.241.000.000,00	0,00
76.120.000,00	0,00	0,00	76.120.000,00	0,00
107.500.000,00	0,00	0,00	107.500.000,00	0,00
48.250.000,00	0,00	0,00	48.250.000,00	0,00

	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00
	101.550.000,00	0,00	0,00	101.550.000,00	0,00
	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
u Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
asional atau Lapangan	45.020.000,00	0,00	0,00	45.020.000,00	0,00
	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	243.500.000,00	0,00	0,00	243.500.000,00	0,00
	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
nya	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00
	1.551.408.000,00	0,00	0,00	1.551.408.000,00	0,00

Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				
	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	DAU	DAK	Lain	Jumlah
an Barang	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	319.525.000,00	0,00	0,00	319.525.000,00	0,00
aten/Kota	127.900.000,00	0,00	0,00	127.900.000,00	0,00
an/Kota	484.427.000,00	0,00	0,00	484.427.000,00	0,00
nangan Kabupaten/Kota	513.906.000,00	0,00	0,00	513.906.000,00	0,00
raan Keluarga (LK3)	95.650.000,00	0,00	0,00	95.650.000,00	0,00
	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00

	1.285.183.200,00	0,00	0,00	1.285.183.200,00	0,00

	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00
	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
	65.705.000,00	0,00	0,00	65.705.000,00	0,00

	65.705.000,00	0,00	0,00	65.705.000,00	0,00
	72.773.200,00	0,00	0,00	72.773.200,00	0,00
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	DAU		DAK	Lain	Jumlah
	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
	747.150.000,00	0,00	0,00	747.150.000,00	0,00
	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00
	453.250.000,00	0,00	0,00	453.250.000,00	0,00
	814.000.000,00	0,00	0,00	814.000.000,00	0,00
	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
	231.500.000,00	0,00	0,00	231.500.000,00	0,00
	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00
	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
N ANAK	1.979.520.200,00	0,00	0,00	1.979.520.200,00	0,00
	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	DAU		DAK	Lain	Jumlah

	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
an Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	137.720.200,00	0,00	0,00	137.720.200,00	0,00
ten/Kota	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
abupaten/Kota	8.720.200,00	0,00	0,00	8.720.200,00	0,00
	947.800.000,00	0,00	0,00	947.800.000,00	0,00
anangan Kabupaten/Kota	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00
ten/Kota	910.800.000,00	0,00	0,00	910.800.000,00	0,00
	554.000.000,00	0,00	0,00	554.000.000,00	0,00
	429.000.000,00	0,00	0,00	429.000.000,00	0,00
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	DAU	DAK	Lain	Jumlah	
	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
a	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00

husus Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	8.026.196.572,00	0,00	0,00	8.026.196.572,00	0,00
	879.918.072,00	0,00	0,00	879.918.072,00	0,00

	19.483.000,00	0,00	0,00	19.483.000,00	0,00
	860.435.072,00	0,00	0,00	860.435.072,00	0,00
	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00

	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
	2.246.278.500,00	0,00	0,00	2.246.278.500,00	0,00

Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					
Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	DAU			DAK	Lain	Jumlah
	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00		0,00
	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00		0,00
	159.849.500,00	0,00	0,00	159.849.500,00		0,00
	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00		0,00
	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00		0,00
	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00		0,00
	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00		0,00
	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00		0,00
	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00		0,00
	157.849.000,00	0,00	0,00	157.849.000,00		0,00
	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		0,00
	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00		0,00
	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00		0,00
ASYARAKAT HUKUM ADAT	4.200.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000.000,00		0,00

	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
--	----------------	------	------	----------------	------

Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00

Prakiraan Maju	Lokasi

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Prakiraan Maiu	Lokasi
Prakiraan Maiu	Lokasi

--	--

--	--

Prakiraan Maiu	Lokasi
Prakiraan Maiu	Lokasi

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Prakiraan Maiu	Lokasi
Prakiraan Maiu	Lokasi

--	--

--	--

--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Mempawah dengan mengacu sesuai dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dengan baik, rutin maupun pengentasan kemiskinan, perlindungan dan pendampingan sosial , perempuan dan anak serta pendampingan masyarakat dan pembangunan Pedesaan. Tentu saja banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah seperti penambahan sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dapat dilaksanakan untuk mendukung Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Mempawah.